

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Christina dan Lili Syafitri. 2012. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang.
http://eprints.mdp.ac.id/704/1/Jurnal%202009210043%20Christina_Mahasi_swa.pdf. 3 Maret 2016.
- Dariati, Sebma Nidia. 2016. Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) Era Orde Baru Tahun 1983-1988. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah. Volume 4, No. 2.
<http://ejournal.unesa.ac.id/article/18715/38/article.pdf>. 29 Agustus 2016.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Israelka, Jefta. 2008. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kaltimex Lestari Makmur.
http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205677.pdf. 3 Maret 2016
- Keen, Michael dan Ben Lockwood. 2006. *Is The VAT a Money Machine?*. *National Tax Journal*. Volume LIX, No. 4. www.warwick.ac.uk. 24 Agustus 2016.
- Le, Tuan Minh. 2003. *Value Added Taxation: Mechanism, Design, and Policy Issues. Paper prepared for the World Bank course on Practical Issues of Tax Policy in Developing Countries* (Washington D.C., April 28-May 1 2003). www.worldbank.org. 18 Agustus 2016.
- M. A., Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mutia, Keukeu. 2003. PPN Indonesia ditinjau dari Teori VAT dan Perkembangannya. FOKUS: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Volume 5 No. 1, Agustus 2003.
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1691/content.pdf?sequence=1>. 28 September 2016.
- Prawiro, Radius. 1990. Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38501/PP/M.XIII/16/2012 perihal Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.

Rahardjo, Hartono. 2014. Analisis Aspek *Business Friendly* pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014, Towards a New Indonesia Business Architecture, Sub Tema: Business and Economic Transformation Towards AEC 2015*. <http://repository.wima.ac.id/987/1/AK007%20-%20Hartono%20Rahardjo.pdf>. 1 Maret 2016.

Republik Indonesia. 1953. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 1953, No. 85. Kementerian Kehakiman. Jakarta.

Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 1983, No. 49. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 1994, No. 59. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 1994, No. 61. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No. 128. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Berita Negara RI Tahun 2007. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 150. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Berita Negara RI Tahun 2009, No. 315. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 82. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business, 4th edition*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugiharto, Hari. 2010. *Tanggung Jawab secara Renteng (Suatu Kajian Sederhana)*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12205-tanggung-jawab-secara-renteng>. 3 Maret 2016.

Sukardji, Untung. 2014. Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2013. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.

TMbooks. 2013. Perpajakan – Esensi dan Aplikasi. Yogyakarta: ANDI OFFSET.